

Kebijakan Havelaar di Lebak

OLEH Ubaidilah Muchtar

Mengabdi secara lain dari yang saya lakukan di Lebak, saya tidak bisa. (Multatuli)

Membaca novel *Max Havelaar* karya Multatuli akan memunculkan banyak pertanyaan. Misalnya sampai berapa jauh *Max Havelaar* identik dengan Eduard Douwes Dekker? Melalui dokumen-dokumen dan surat-surat tentu hal tersebut dapat kita temukan jawabannya. Bahwa mengenai garis-garis besar atau lebih tepatnya mengenai fakta-fakta pokok, Havelaar sangat identik dengan Dekker. Itu kenyataan sejarah. Akan tetapi mengenai detail-detail identitasnya tidak dapat dipertahankan. *Max Havelaar* merupakan sebuah roman autobiografis, artinya di samping cerita atau laporan mengenai Dekker di Lebak yang pada umumnya tidak jauh menyimpang dari kenyataan, maka unsur fiksi (rekaan) juga memainkan peran penting.

Menyoal unsur fiksi dalam *Max Havelaar* dapat ditemukan bahwa dalam novel tersebut, pribadi Dekker sangat ideal sehingga menimbulkan kontras hitam-putih yang memang disengaja antara seorang idealis yang luhur budinya, yang membela kaum tertindas di satu pihak dan lawan yang bagi Dekker bejat akhlaknya di lain pihak.

Jadi, Havelaar merupakan seorang tokoh dalam novel yang diceritakan oleh seorang pengarang novel. Selain itu kita perlu mengingat bahwa Havelaar dipandang lewat matanya Stern, seorang pemuda yang berwatak romantis, sebuah metode penokohan yang digunakan Multatuli untuk menjelaskan jarak antara kenyataan dan khayalan. Dan dengan demikian kita dapat sampai pada kenyataan bentuk artistik buku inilah yang memerikan ruang bagi romantisasi, seperti misalnya pada pidato Havelaar di depan para pemuka Lebak dan perjalanan Havelaar pada malam hari ke daerah Parungkujang. Tetapi meskipun Havelaar tidak dapat diidentifikasi dengan Dekker, namun tindakan Havelaar di Lebak sama dengan tindakan Dekker di Lebak. Kebijakan Havelaar di Lebak sama dengan kebijakan Dekker di Lebak. Demikian pula cara tindakan tersebut terjadi. Surat-surat dan dokumen-dokumen yang tersaji dalam *Max Havelaar* membuktikan hal tersebut.

Lalu muncul lagi pertanyaan apakah tindakan atau kebijakan Havelaar di Lebak sudah tepat atau justru Havelaar gagal dalam tindakannya? Tentu saja pertanyaan ini dapat kita abaikan sebagai sesuatu yang kurang relevan, apabila kita hanya ingin memperhatikan arti *Max Havelaar* sebagai sebuah karya sastra, apalagi akibat mendalam novel ini di kemudian hari. Mengenai akibat *Max Havelaar* ini, yang merupakan tulisan politis secara tidak langsung sangat besar pengaruhnya terhadap pemerintahan tanah-tanah jajahan Belanda. Multatuli diakui meninggalkan pengaruh tertentu, terutama pada pemimpin-pemimpin pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan. Para pemimpin yang mendapat kesempatan memanfaatkan tulisan-tulisan Multatuli di saat mereka bersekolah menengah Belanda. Novel ini memainkan perannya dalam membangkitkan kesadaran politik orang-orang Indonesia. Tentu saja, jumlahnya kecil, tetapi dari golongan kecil itulah muncul nasionalisme Indonesia. *Max Havelaar* menjadi besar artinya.

Dengan menyadari arti penting novel ini kita mungkin akan makin condong dan menaruh simpati kita pada Havelaar, melawan atasannya yaitu Residen Banten Slijmering dan Gubernur Jenderal, melawan Bupati Lebak Raden Adipati Karta Natanaegara dan para pengikutnya. Selain tentu saja kita mengetahui bahwa inti dari apa yang diteriakkan oleh Multatuli bahwa “Orang Jawa diperlakukan dengan buruk!”, “Orang Jawa dieksploitasi secara berlebihan! Multatuli menuntut hak dan keadilan bagi “orang Jawa” bagi bangsa Indonesia. Multatuli melakukan hal tersebut dengan gagah dan penuh keberanian. Ia mengorbankan kedudukan dan kariernya untuk memasuki kehidupan yang bahkan hingga

kematiannya penuh kepahitan, kemelaratan, dan penderitaan. Hingga akhir kematiannya terdapat dua interpretasi mengenai kebenaran Eduard Douwes Dekker. Pertama mereka yang membela dan mengakui kebenaran atas apa yang dilakukan Dekker di Lebak. Kebenaran itu misalnya dibela oleh Veth dengan penuh wibawa pada 1860 dan Du Perron serta Stuiveling seperti disampaikan oleh Termorshuizen (1973: hlm. 4). Mereka membela cara Dekker bertindak di Lebak. Secara singkat menurut tafsiran Du Perron dan Stuiveling, Dekker dikorbankan kepada semangat birokratis yang pertama-tama mengabdikan pada kepentingan pribadi. Studi lebih lanjut tentang *Max Havelaar* seperti disampaikan Garadian dalam *Membaca Ulang Max Havelaar* (Carey, 2019) yang mengutip Phijfeer 2000 dan Salverda 2005 yang mengemukakan bahwa *Max Havelaar* adalah karya sastra yang menonjolkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Kemudian studi dari Feenberg 1997, Sen and Hill 2006 dan Toer 1999 yang menyatakan bahwa *Max Havelaar* merupakan upaya cerdas untuk membunuh kolonialisme dan imperialisme. Kedua, mereka yang melihat bahwa Dekker tidaklah terbentur dengan atasannya karena dia ingin menindak praktik-praktik buruk, melainkan karena caranya dia mau mengadakan tindakan tersebut tidak masuk akal atau mustahil. Hal tersebut dikemukakan oleh Wertheim, Sartono Kartodirdjo (1888), dan Nieuwenhyus (1977). Studi terakhir dari Zook (2006) yang berani memperlihatkan bahwa *Max Havelaar* bukanlah kritik Multatuli terhadap kolonialisme. Justru sebaliknya, novelnya justru menjadi cara bagi Eduard Douwes Dekker untuk mendapatkan kembali posisinya sekaligus promosi ke jenjang yang lebih tinggi di struktur pemerintahan Hindia Belanda.

Kita akan melihat apakah Dekker benar dalam tindakannya di Lebak? Bagaimana “lawan” Dekker dalam konflik di Lebak? Hal tersebut sangat bernilai agar kita mampu melihat dengan lebih terbuka dan masuk akal sebab seperti kita ketahui dalam *Max Havelaar*, lawan Dekker yaitu residen Banten, bupati Lebak, dan Gubernur Jenderal dilukiskan dengan warna yang kurang menarik.

Berdasarkan kontak pribadi dan rasa simpati maka pada awal bulan Januari 1856, Douwes Dekker diangkat Gubernur Jenderal Duymaer van Twist menjadi asisten residen di Lebak. Pada tanggal 21 Januari 1856 Dekker menerima tugas tersebut. Sambil mempelajari arsip yang ditinggalkan oleh pendahulunya ia dapat memperoleh suatu gambaran mengenai praktik-praktik yang membebani rakyat Lebak. Sebagai dalang, disebut Bupati Lebak dan terutama menantunya, Demang Parungkujang Raden Wira Kusuma. Dalam pandangan Dekker praktik membebani rakyat tersebut tidak dapat dibenarkan. Musababnya akan ada kunjungan saudara sepupunya yang menjadi Bupati Cianjur, maka bupati Lebak, Raden Adipati Karta Natanagara mengerahkan rakyatnya untuk membersihkan alun-alun dari rumput. Jumlahnya menurut Dekker terlalu banyak. Dekker lalu meminta bupati untuk menyuruh orang-orang itu pulang. Di saat yang bersamaan, Dekker mendengar bahwa pendahulunya meninggal karena diracun. Dekker mengambil keputusan pada 24 Februari 1856 ia menghubungi atasannya, residen Banten Brest van Kempen, dan secara resmi mengadakan perbuatan bupati. Bupati diduga memeras rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan. Demang Parungkujang disangka merupakan tangan kanan bupati dalam praktik tersebut. Usul Dekker yaitu “dengan secepat mungkin” menyingkirkan bupati dari Lebak dan memasukkan Demang Parungkujang dalam tahanan sementara. Dengan demikian dapat diadakan pengusutan yang adil dan mendalam. Dekker berkeyakinan selama dua orang tersebut masih ada di Lebak, tidak mungkin memperoleh kesaksian-kesaksian yang terus terang dan jujur.

Tuan residen akhirnya datang ke Rangkasbitung dan minta kepada Dekker untuk menunjukkan segala laporan dan data-data. Dekker menolak dan meminta agar terlebih dahulu bupati dan menantunya ditahan. Brest van Kempen terpaksa meneruskan pengaduan tersebut kepada Gubernur Jenderal Duymaer van Twist. Perkembangan seterusnya pada 28 Maret, Dekker menerima surat bahwa tindakannya tidak dibenarkan dan ia akan dipindahkan.

Dengan kecewa dan marah Dekker mengajukan permohonan agar dibebaskan dari segala jabatan. Pada tanggal 4 April permohonan tersebut dikabulkan. Keluarga Dekker berangkat ke Batavia. Sampai tiga kali ia memohon agar dapat menghadap Gubernur Jenderal untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tetapi permohonan tersebut ditolak. Setelah Dekker berangkat, di bawah pimpinan Brest van Kempen diadakan pengusutan setempat dan sebagian dari pengaduan Dekker ternyata benar. Kekuasaan memang disalahgunakan.

Dari fakta-fakta tersebut sangat jelas dan sederhana nampaknya. Terutama dalam pandangan yang sekarang berlaku di dunia Barat mengenai norma-norma baik dan buruk, tentang adil dan tidak adil. Akan tetapi fakta-fakta tersebut menjadi berlainan bila kita menafsirkannya dalam pandangan latarbelakang masyarakat Banten dewasa itu. Terutama dalam pandangan hukum adat. Dalam masyarakat serupa itu maka pemerintah yang sesungguhnya adalah pejabat-pejabat pribumi. Dekker dianggap kurang maklum akan “hukum rakyat” itu.

Sistem pemerintahan di pulau Jawa ialah dualistis, ada korps pegawai negeri dari Eropa dan ada juga korps Priyayi (kepala-kepala adat). Menjadi persoalan ketika rakyat tidak langsung takluk kepada pemerintah Hindia Belanda, orang Eropa, melainkan kepada kepala-kepala mereka sendiri. Korps pegawai negeri dari Eropa bertugas terutama mengawasi saja, melakukan kontrol yang dapat dilakukan sambil berjumpa dengan kepala adat dan sambil mengelilingi daerah yang termasuk lingkup kekuasaannya untuk memperoleh pengetahuan keadaan setempat.

Bagaimanakah keadaan di dalam kresidenan Banten yang di dalamnya termasuk Lebak? Banten termasuk daerah minus dan tidak termasuk wilayah Cultuurstelsel. Tanahnya terlalu miskin dan hampir tidak ada jalan-jalan dan tidak ada saluran irigasi. Pokoknya yang dalam anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda dianaktirikan. Banten buruk sekali dengan segala akibatnya: kemiskinan, paceklik, banyak penduduk pindah ke daerah-daerah yang lebih makmur. Kedudukan para kepala adat juga jauh dari memuaskan. Gaji mereka terlalu rendah. Para bupati di Banten tidak mendapatkan uang komisi dari penghasilan seperti kopi dan gula. Akibat dari semuanya ialah kepala-kepala adat beserta rumahtangganya tidak dapat hidup sesuai dengan pangkat derajat kebangsawanan seperti telah menjadi tradisi dalam pandangan rakyat. Dapat dibayangkan bahwa bagi para kepala adat di Banten, jasa-jasa dan upeti dari kamu petani miskin sangat penting.

“Keadaan di sana ketika itu sedemikian rupa, sehingga telah terdapat suatu ketegangan yang tak terpikul lagi antara apa yang dituntut –dan yang menuntut adat dapat dituntut—oleh kepala-kepala adat dengan apa yang mampu diberikan oleh penduduk. Di Lebak terdapat suatu keadaan yang miskin, malahan kadang-kadang kelaparan, akan tetapi sulit kiranya diterima bahwa kepala-kepala Pribumilah yang bersalah mengenai keadaan itu. Bila demikian halnya maka bupati dan kepala rendahan lainnya di Banten mestinya telah kaya, tetapi mereka sama sekali tidak kaya.” (Nieuwenhyus, 1977: 46-47)

Para kepala adat memang melampaui batas-batas. Pengusutan lebih lanjut di kemudian hari membuktikan adanya praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Penyalahgunaan kekuasaan memang terjadi dan Dekker seperti banyak orang sebelumnya melihat gejala-gejalanya. Tetapi penyebab yang sesungguhnya tidak dilihat oleh Dekker. Mengutip Nieuwenhyus yang mengemukakan bahwa seharusnya bukan bupati, melainkan pemerintah Hindia Belanda yang seharusnya diadukan oleh Multatuli:

”Daripada mengadukan bupati itu, Dekker seharusnya lebih baik mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai biaya hidup dan gaji kepala-kepala Pribumi pada umumnya dan gaji bupati khususnya. Dengan demikian ia akan dapat menarik kesimpulan bahwa gaji kepala-kepala itu berada jauh di bawah kebutuhannya.” (Nieuwenhyus, 1977: 47-48)

Selanjutnya kita akan menelisik Gubernur Jenderal Duymaer van Twist yang melihat penyebab perkara Lebak ini. Berulang kali selama masa jabatannya ia mendesak pemerintah di negeri Belanda agar gaji para kepala pribumi ini dinaikkan, tetapi sia-sia. Gubernur Jenderal van Twist merupakan salah seorang gubernur yang tidak mengutamakan kepentingan Belanda di atas segala-galanya dan dengan mengorbankan orang Indonesia. Meski demikian Duymaer van Twist tidaklah seratus persen bersih. Ia bertanggung jawab atas pengangkatan Dekker. Perkara Lebak sebageian besar berpangkal dari pengangkatan Dekker yang dilakukan olehnya. Hubungan pribadinya dengan Dekker menjadi titik pangkal perkara Lebak terjadi. Meski demikian hubungannya dengan Dekker berakhir tanpa pertemuan. Duymaer van Twist tidak mau berjumpa dengan Dekker yang beberapa waktu lalu sangat percaya ia akan didukung. Inilah tamparan terbesar bagi Dekker karena dengan demikian kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang dianggap benar terputus sudah.

“Persangkaan Dekker yang tidak benar bahwa Van Twist telah membiarkan dirinya ‘ditipu’ oleh anggota-anggota Dewan Hindia Belanda, membuat penguasa itu tidak berminat untuk menerima kedatangannya. (Lagi pula Van Twist selalu telah mengambil pendirian: orang itu sudah minta berhenti, aku sudah mengabulkan permintaannya itu, mau apa lagi?)

Semua itu menyedihkan, tapi juga sedikit lucu.

Van Twist tidak mau menerimanya. Van Twist ada bisul di kakinya. Van Twist terlalu sibuk dengan keberangkatannya ke negeri Belanda. Dan tidak lama kemudian berangkatlah ia (tanggal 14 Mei 1856). Van Twist tidak mampu melihat seorang pembaharu dalam dirinya. (Hermans, 1988, hlm: 61-62)

Atasan Dekker di Banten adalah residen Banten Brest van Kempen. Di *Max Havelaar* ia dilukiskan sebagai Slijmering (Si Lidah Bergetah). Sebenarnya watak van Kempen baik dan jujur. Sikapnya kepada Dekker sangat simpatik. Brest van Kempen mencoba mencegah Dekker minta berhenti. Brest van Kempen mengundang Dekker sekeluarga tinggal sementara di rumahnya setelah ia berhenti. Dalam mengungkap perkara Lebak, Van Kempen tidak melawan diadakannya sebuah pengusutan, hanya cara yang dijalankan Dekker yang dimasalahkannya. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesudah Dekker dibebastugaskan tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Hasil pemeriksaan dibuka secara gamblang. Dalam catatan William Frederik Hermans (1988) terungkap bahwa:

“Tanggal 20 September 1856 Brest van Kempen mengirimkan laporan yang tebal mengenai penyelidikan-penyelidikannya kepada Gubernur Jenderal Pahud. Tanggal 11 Desember tahun itu juga Pahud menetapkan keputusannya: Bupati Karta Nata Negara telah ‘terbukti bersalah mempekerjakan orang dengan cara yang tidak sah, merampas uang dan mengambil kerbau orang dengan pembayaran yang tidak seimbang atau tanpa pembayaran sama sekali.’ (Hermans, 1988: 63)

Akan tetapi terdapat hal-hal yang meringankan yaitu kesulitan keuangan karena bupati harus membiayai banyak anggota keluarga dan pejabat-pejabat rumah tangga. Kesimpulannya residen seharusnya memberi peringatan keras kepada bupati, tetapi bupati juga harus diberi tunjangan keuangan. Demang Parungkujang dan beberapa pejabat rendahan lainnya dipecat.

‘Tuan Dekker,’ demikian Adipati Karta Natanagara suka bercerita, ‘ia seorang yang baik, tapi sedikit sinting. Di sini ia selalu saja duduk di kantornya, kepalanya dikompres karena selalu sakit kepala.’ Raden Adipati Karta Natanagara berasal dari keluarga terkemuka di Jasinga. Pada tahun 1837 ia diangkat menjadi bupati Lebak. Ketika Dekker memangku

jabatan sebagai asisten residen, ia sudah menjabat selama hampir dua puluh tahun. Ia ditakuti sekaligus dihormati oleh rakyat yang menyangka ia dikaruniai kesaktian. Di antara dunia Dekker dan dunia Adipati Karta Natanagara terdapat jurang yang lebih lebar dan lebih dalam daripada jurang yang terletak di belakang Rumah Dinas Douwes Dekker di Rangkasbitung. Jurang tempat jaksa dan mereka yang mengadu kehilangan kerbau itu muncul dari kegelapan.

Ketika Dekker tiba di Rangkasbitung, bupati berada dalam kesulitan keuangan. Kemudian bertambah sulit lagi dengan kunjungan saudara sepupunya. Bupati harus menerima kunjungan mereka dengan kemegahan yang diwajibkan. Para pejabat akan datang dengan keluarga yang banyak, pengawal pribadi dan penari-penari, seluruhnya kurang lebih seratus orang. Ketika itu bupati menerima gaji kira-kira f 700 sebulan dan dikurangi f 150 untuk mencicil utang-utangnya kepada pemerintah. Dengan sisa f 550 bupati tidak hanya harus memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri beserta sanak saudaranya, juga macam-macam kewajiban keuangan lainnya yang merupakan konsekuensi dari kedudukannya.

Kunjungan saudara sepupu Adipati Karta Natanagara, membuat ia memanggil sejumlah orang untuk membersihkan pelatarannya. Ketika hal itu terjadi Dekker menyuruh pulang orang-orang yang harus membersihkan pekarangan. Hal tersebut tentu mempermalukan adipati di depan mata orang banyak. Sementara sebentar lagi sepupunya akan datang berkunjung.

Dekker tidak cukup menyadari bahwa hubungan seorang bupati dengan masyarakatnya berbeda dengan hubungan seorang sersan di dalam suatu organisasi militer. Seorang bupati merupakan seorang kepala suatu masyarakat di dalam ikatan-ikatan yang sakral, sosial, dan religus.

Oleh karena hal tersebut Brest van Kempen tidak menanggapi usul-usul Dekker tetapi meneruskan perkara ini kepada Gubernur Jenderal yang pada tanggal 23 Maret 1856 menulis surat No. 54 di Bogor.

“Cara anda bertindak setelah mengetahui atau mengira mengetahui praktik-praktik buruk kepala-kepala daerah Lebak dan sikap yang anda perlihatkan terhadap sep anda, residen Banten, telah sangat menimbulkan perasaan tidak senang pada saya.”

“Perbuatan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan sama sekali dan mudah memberikan kesan bahwa anda tidak cakap untuk menduduki sesuatu jabatan sebagai pangreh praja.” (Multatuli, hlm. 335-336)

Ini tamparan keras bagi Dekker. Akan tetapi, Dekker tetap yakin akan ketepatan caranya bertindak di Lebak. “Mengabdikan secara lain dari yang saya lakukan di Lebak, saya tidak bisa,” demikian ia menulis kepada Duymaer van Twist. Ia akan tetap mempertahankan sikap ini sampai titik akhir. Usaha dan tindakannya dalam upaya memperoleh pemulihan kehormatan, kekusaran, dan gugatannya di kemudian hari tidak akan tampak wajar dan tidak akan pernah bercorak murni bila tidak didasarkan pada keyakinan dan kebenarannya. Tanpa itu pula *Max Havelaar* tidak akan lahir.

Daftar Pustaka

- Carey, Peter, dkk. 2019. *Membaca Ulang Max Havelaar*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
Hermans, Willem Frederik. 1988. *Multatuli yang Penuh Teka-Teki*. Jakarta: Djambatan
Multatuli. 2000. *Max Havelaar*. Jakarta: Djambatan.
Nieuwenhyus, Rob. 1977. *Hikayat Lebak*. Jakarta: Pustaka Jaya.
Termorshuizen, Gerard, dkk. 1973. *Kian Kemari: Indonesia dan Belanda dalam Sastra*. Jakarta: Djambatan.